



KETAHANAN SEKTOR KEUANGAN INDONESIA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Bidang Penelitian dan Kajian Keilmuan

Hima-EP FEB Unisba Periode 2024-2025

ABSTRAK

Ketahanan sektor keuangan Indonesia menjadi isu strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu oleh berbagai dinamika seperti konflik geopolitik, pandemi, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan moneter negara maju. Ketahanan ini penting untuk memastikan fungsi intermediasi keuangan, transmisi kebijakan moneter, dan sistem pembayaran tetap berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketahanan sektor keuangan Indonesia di tengah tekanan global, serta secara spesifik menelaah peran otoritas keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menganalisis berbagai kebijakan makroekonomi, strategi pengawasan OJK, serta respons terhadap isu-isu terkini seperti tarif dagang Amerika Serikat dan kekhawatiran terhadap sistem pembayaran digital QRIS. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan berbagai strategi adaptif dan preventif melalui penguatan koordinasi kebijakan, reformasi struktural, dan literasi keuangan. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, otoritas moneter dan keuangan, serta

partisipasi aktif masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi fondasi utama dalam menjaga daya tahan sektor keuangan menghadapi gejolak global.

Kata kunci: Ketahanan sektor keuangan, ketidakpastian global, studi literatur, QRIS

Pendahuluan

Ketahanan sektor keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan suatu negara mampu menyerap guncangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta tetap menjaga stabilitas sistemik. Ketahanan ini menjadi kunci agar fungsi intermediasi, transmisi kebijakan moneter, dan sistem pembayaran dapat terus berjalan secara efektif dan efisien dalam berbagai situasi ekonomi (Bank Indonesia, 2023; IMF, 2020). Menurut Bank Indonesia (2023), ketahanan sektor keuangan mencerminkan kemampuan sistem keuangan dalam menjalankan fungsinya secara optimal, bahkan di tengah tekanan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Fungsi-fungsi utama seperti penyaluran dana (intermediasi), pelaksanaan kebijakan moneter, serta kelancaran sistem pembayaran harus tetap terjaga agar stabilitas makroekonomi nasional tidak terganggu.

Dalam konteks global yang semakin saling terhubung, tantangan terhadap ketahanan sektor keuangan semakin kompleks. Ketidakpastian global, seperti gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga perubahan kebijakan moneter oleh bank sentral utama dunia, menuntut sistem keuangan nasional untuk semakin adaptif dan resilien (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Hidayat et al., 2024). Oleh karena itu, ketahanan tidak hanya bergantung pada sektor perbankan, melainkan juga mencakup stabilitas pasar modal, lembaga keuangan non-bank, dan efektivitas kerangka regulasi serta pengawasan yang diberlakukan (Widowati, 2024).

Dalam lingkungan global yang kian terhubung, ketidakpastian seperti krisis geopolitik, pandemi, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga kebijakan moneter negara maju seperti Amerika Serikat, memiliki potensi besar untuk memengaruhi kondisi domestik suatu negara, termasuk Indonesia.

Ketahanan sektor keuangan dibangun melalui berbagai pilar, yaitu tata kelola yang baik, manajemen risiko yang memadai, permodalan yang kuat, dan pengawasan yang efektif (Hanifa Salsabila et al., 2024). Sistem keuangan yang tahan terhadap guncangan memiliki mekanisme mitigasi risiko yang mampu mengurangi efek domino dari satu sektor ke sektor lain. Misalnya, bank-bank yang memiliki kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) yang tinggi dan likuiditas yang memadai akan lebih mampu bertahan ketika terjadi *capital outflow* secara tiba-tiba akibat perubahan suku bunga global. Sektor keuangan yang resilien juga harus memiliki infrastruktur yang mendukung, seperti sistem pembayaran digital yang aman dan andal, serta keterhubungan yang baik antara pelaku industri, regulator, dan otoritas fiskal.

Ketahanan sektor keuangan akan benar-benar teruji ketika menghadapi guncangan eksternal. Sebagai negara berkembang dengan perekonomian yang terbuka terhadap perdagangan internasional dan arus modal global, Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap dampak dari ketidakpastian global. Ketidakpastian global dapat diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh tingginya keraguan terhadap arah perekonomian dunia, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sulit diprediksi.

Selama dekade terakhir, ketidakpastian global mengalami peningkatan yang signifikan akibat berbagai peristiwa besar yang mengguncang tatanan ekonomi dunia, seperti krisis utang di kawasan Eropa, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, invasi Rusia ke Ukraina, serta pandemi COVID-19. Berbagai ketidakpastian ini telah memperburuk ekspektasi pelaku pasar dan investor, yang pada gilirannya memicu peningkatan volatilitas di pasar keuangan global. Dalam situasi tersebut, investor cenderung menarik dananya dari negara-negara berkembang yang dipandang lebih berisiko, termasuk Indonesia, dan mengalihkan investasinya ke aset-aset yang dianggap lebih aman, seperti obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury). Perpindahan modal ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar, meningkatkan fluktuasi di pasar saham, serta menaikkan imbal hasil obligasi di negara-negara berkembang (Hidayat et al., 2024).

Indonesia tidak terlepas dari dampak ketidakpastian global tersebut. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbuka, sektor keuangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal, termasuk perubahan kebijakan suku bunga oleh *The Federal Reserve*, harga komoditas global, serta sentimen investor terhadap *emerging markets*. Misalnya, saat *The Fed* menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan inflasi, terjadi aliran modal keluar dari Indonesia yang menekan nilai tukar rupiah dan mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik. Meskipun demikian, sektor keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif baik berkat fondasi yang telah dibangun selama dua dekade terakhir pasca krisis keuangan Asia tahun 1998. Reformasi di sektor perbankan, peningkatan kualitas pengawasan, serta pembentukan otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena ketahanan sektor keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian global secara mendalam dan sistematis. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan resmi dari pemerintah dan lembaga keuangan (seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan), artikel berita terpercaya, serta publikasi internasional yang relevan. Pendekatan ini menjadikan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kebijakan, serta strategi yang diterapkan dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis isi dokumen dan literatur untuk menemukan keterkaitan antara faktor eksternal global dan respons domestik yang memengaruhi ketahanan sistem keuangan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi dokumentasi seminar dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena ketahanan sektor keuangan

Indonesia di tengah ketidakpastian global secara mendalam dan sistematis. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan resmi dari pemerintah dan lembaga keuangan (seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan), artikel berita terpercaya, serta publikasi internasional yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan materi presentasi dari dua narasumber seminar dosen akademisi dan praktisi OJK yang disampaikan dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Hima-EP FEB Unisba Periode 2024-2025, sebagai bagian dari dokumentasi yang dianalisis. Analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis isi dokumen, materi seminar, dan literatur untuk menemukan keterkaitan antara faktor eksternal global dan respons domestik yang memengaruhi ketahanan sistem keuangan Indonesia.

Pembahasan

Dampak Ketidakpastian Global terhadap Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia

Ketidakpastian global yang bersumber dari konflik geopolitik, perubahan kebijakan suku bunga oleh bank sentral utama dunia, serta perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas sektor keuangan Indonesia. Dalam kondisi global yang memburuk, investor cenderung menarik dananya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, dan mengalihkannya ke instrumen investasi yang dianggap lebih aman. Fenomena ini menyebabkan terjadinya *capital outflow*, pelemahan nilai tukar rupiah, serta peningkatan volatilitas di pasar saham dan obligasi domestik. Sektor perbankan Indonesia pun tidak luput dari tekanan tersebut. Risiko kredit dan fluktuasi likuiditas meningkat, terutama di tengah pelemahan ekonomi global. Kinerja debitur, khususnya dari sektor ekspor, berpotensi menurun, yang dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*). Di sisi lain, ekspektasi terhadap suku bunga tinggi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat turut menekan margin perbankan dalam negeri dan menghambat penyaluran kredit.

Kendati demikian, ketahanan sektor perbankan Indonesia masih tergolong kuat. Hal ini ditopang oleh kecukupan modal yang memadai, kestabilan cadangan devisa, serta pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Kondisi ini memberikan ruang bagi perbankan nasional untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi di tengah tekanan global. Di tingkat regional, khususnya di Provinsi Jawa Barat, sektor perbankan juga menunjukkan ketahanan yang relatif stabil. Per Maret 2025, total aset perbankan di Jawa Barat tumbuh sebesar 3,24% secara tahunan, sementara penyaluran kredit meningkat 4,77% (Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, 2025). Sektor industri pengolahan dan perdagangan besar menjadi kontributor utama dalam pembiayaan, menandakan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih berlangsung positif. Sebaliknya, sektor konstruksi dan properti mengalami kontraksi, yang menunjukkan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang rentan terhadap risiko eksternal. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) di wilayah ini masih dalam batas wajar, yaitu sebesar 2,79% untuk kredit investasi, 2,91% untuk kredit konsumsi, dan 5,52% untuk kredit modal kerja. Meski demikian, sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar ekspor tetap perlu diwaspadai, mengingat risiko pelemahan permintaan global dan fluktuasi nilai tukar masih cukup tinggi (Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, 2025).

Dalam merespons tekanan global tersebut, otoritas keuangan Indonesia menjalankan kebijakan yang terkoordinasi dan antisipatif. Bank Indonesia memperkuat intervensinya di pasar valuta asing serta mengoptimalkan instrumen moneter untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, OJK memperketat pengawasan terhadap risiko sistemik di seluruh sektor jasa keuangan melalui pendekatan berbasis risiko, mencakup bank umum, BPR, *fintech*, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun. Pemerintah juga memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati, percepatan belanja negara, serta penguatan investasi daerah. Di Jawa Barat, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp68,5 triliun pada Triwulan I 2025, menjadikannya sebagai motor

penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan sektor keuangan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks (Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, 2025).

Strategi Ekonomi Makro untuk Menjaga Ketahanan Sektor Keuangan di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam menghadapi era global yang ditandai dengan kondisi VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous*), Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas sektor keuangannya. Ketidakpastian global yang bersumber dari konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok perubahan kebijakan suku bunga oleh bank sentral utama dunia (misalnya *The Federal Reserve*), serta fluktuasi harga komoditas energi dan pangan menjadi faktor eksternal dominan yang memengaruhi stabilitas makroekonomi nasional (Amaliah, 2025). Sebagai respons terhadap tekanan eksternal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan berkelanjutan. Strategi utama yang dijalankan meliputi pengendalian defisit anggaran agar tetap berada dalam batas aman serta pengelolaan utang negara secara bijaksana. Tujuannya adalah menciptakan ruang fiskal yang fleksibel untuk merespons dinamika eksternal tanpa mengganggu kesinambungan program pembangunan nasional (Amaliah, 2025; Surdikina et al., 2025). Upaya ini juga didukung oleh efisiensi belanja negara dan optimalisasi penerimaan, yang menjadikan keberlanjutan fiskal sebagai landasan kebijakan makroekonomi jangka menengah dan panjang.

Di sisi lain, peran otoritas moneter dan pengawasan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam memperkuat stabilitas sektor keuangan. Bank Indonesia menyesuaikan kebijakan moneter secara responsif terhadap tekanan global, sementara OJK memperkuat pengawasan makroprudensial dengan pendekatan berbasis risiko terhadap lembaga keuangan. Kebijakan yang

sinergis antara fiskal dan moneter ini bertujuan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, memastikan tersedianya likuiditas yang memadai, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu (Widowati, 2024).

Strategi dan Peran OJK dalam Menjaga Ketahanan Sektor Keuangan Nasional

Salah satu strategi utama dalam menjaga ketahanan sektor keuangan nasional adalah penguatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) terhadap seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pendekatan ini menggabungkan pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis risiko guna mendeteksi potensi krisis secara dini, memitigasi risiko sistemik, serta memastikan lembaga jasa keuangan (LJK) menerapkan tata kelola yang baik dan sistem manajemen risiko yang memadai sesuai standar yang berlaku (Widowati, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Selain pengawasan reguler, OJK juga menjalankan kebijakan kontra-siklus (*counter-cyclical*) seperti relaksasi kredit, restrukturisasi pinjaman, dan penerapan *buffer* modal untuk menjaga stabilitas dan likuiditas sektor jasa keuangan di tengah tekanan ekonomi global. Strategi ini turut diperkuat melalui perluasan akses pembiayaan yang berkelanjutan, khususnya bagi pelaku UMKM, sebagai langkah untuk menopang sektor riil dan memperluas inklusi keuangan (Hanifa Salsabila et al., 2024).

Selain itu, OJK memperkuat pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan dengan mengedepankan pendekatan responsif terhadap aduan masyarakat. Hingga Triwulan I tahun 2025, sekitar 93% pengaduan masyarakat telah berhasil diselesaikan (Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, 2025). Pemeriksaan tematik dilakukan untuk mengatasi isu-isu strategis, seperti transparansi layanan keuangan digital, pengelolaan klaim dan agunan, serta penguatan sistem informasi keuangan. OJK juga menetapkan kebijakan *anti-fraud* melalui regulasi POJK 12/2024 sebagai pedoman bagi LJK dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan (OJK, 2024). Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, OJK terus mendorong peningkatan

literasi dan inklusi keuangan. Program literasi di Jawa Barat telah menjangkau lebih dari 100.000 peserta lintas segmen, termasuk pelajar, ibu rumah tangga, petani, pelaku UMKM, dan penyandang disabilitas sepanjang 2024 hingga April 2025. Tujuan dari program ini adalah membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar keuangan agar mampu mengelola keuangan secara bijak, memahami risiko, serta terhindar dari investasi ilegal (Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, 2025).

Sebagai bagian dari sinergi kebijakan nasional, OJK turut berperan aktif dalam koordinasi makroprudensial melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS. Pendekatan kolektif ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. OJK juga mendukung integrasi pengawasan sektor keuangan dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan. Melalui sinergi kebijakan, pengawasan adaptif berbasis data, dan edukasi publik, diharapkan sektor keuangan Indonesia dapat tetap resilien dan inklusif di tengah tantangan global (Widowati, 2024; OJK, 2024).

Respons Pemerintah Indonesia terhadap Kekhawatiran Amerika Serikat atas QRIS

Pemerintah Indonesia merespons secara tegas dan diplomatis kekhawatiran yang disampaikan oleh Amerika Serikat terkait implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang dinilai berpotensi menghambat persaingan sistem pembayaran asing di pasar domestik. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa keberadaan QRIS yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagai sistem pembayaran nasional berbasis *QR code* dapat membatasi ruang gerak penyedia layanan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa QRIS tidak dirancang sebagai instrumen pembatasan, melainkan merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas inklusi keuangan serta membangun ekosistem pembayaran digital yang aman, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Monica et al., 2025). Sejumlah

penelitian mendukung klaim ini, dengan menunjukkan bahwa implementasi QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mendorong kinerja pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya melalui kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran digital (Kuswoyo et al., 2024).

Bank Indonesia turut menegaskan bahwa QRIS bersifat terbuka dan tidak diskriminatif terhadap pelaku industri, baik domestik maupun asing, selama mereka mematuhi regulasi nasional yang berlaku. Penelitian lain menyebutkan bahwa hambatan dalam implementasi QRIS justru lebih banyak bersumber dari keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital, bukan dari kebijakan yang bersifat eksklusif terhadap pelaku asing (Rachman et al., 2024). Lebih lanjut, Pemerintah menekankan bahwa sistem pembayaran domestik seperti QRIS memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembayaran asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan tingginya biaya transaksi. Di sisi lain, QRIS bukan merupakan simbol proteksionisme, melainkan platform kolaboratif. Hal ini tercermin dari inisiatif QRIS lintas negara yang telah terjalin dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, sebuah bentuk diplomasi keuangan lunak Indonesia untuk memperkuat interoperabilitas sistem pembayaran dan kerja sama keuangan kawasan ASEAN (Aryowiloto et al., 2024).

Penelitian tambahan juga mencatat bahwa pengembangan QRIS memiliki orientasi strategis dalam memperkuat kemandirian sistem keuangan nasional dan mendorong daya saing pelaku usaha mikro dan kecil melalui penyediaan sistem pembayaran yang aman, cepat, dan hemat biaya (Metri, 2024). Untuk menghindari persepsi negatif, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri menjalin komunikasi intensif dengan otoritas terkait di Amerika Serikat. Langkah ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran nasional tidak ditujukan untuk membatasi perdagangan, melainkan untuk memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Dampak Tarif Baru Amerika Serikat terhadap Indonesia dan Implikasinya bagi Ketahanan Sektor Keuangan Nasional

Pengenaan tarif sebesar 10% hingga 32% oleh Amerika Serikat terhadap berbagai produk asal Indonesia, seperti tekstil, produk karet, dan peralatan elektronik rumah tangga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekspor dan pemerintah. Kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan *proteksionisme* perdagangan yang diambil oleh Amerika Serikat untuk melindungi industri domestiknya dari persaingan impor, khususnya dari negara-negara berkembang yang dinilai memberikan subsidi atau insentif yang tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia di *World Trade Organization* (WTO), menyatakan keprihatinan atas kebijakan tersebut dan tengah mengkaji langkah strategis yang dapat ditempuh. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengajuan keberatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Di samping itu, pendekatan diplomatik langsung dengan pemerintah Amerika Serikat juga ditempuh guna membuka ruang dialog dan menjelaskan posisi Indonesia. Pemerintah menekankan pentingnya hubungan dagang bilateral yang sehat, yang harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, transparansi, serta penghormatan terhadap aturan multilateral yang berlaku. Pengenaan tarif ini berpotensi menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat, sekaligus menimbulkan tekanan makroekonomi yang signifikan. Dampak negatif yang mungkin timbul meliputi pelemahan nilai tukar rupiah, peningkatan defisit neraca transaksi berjalan, serta tekanan inflasi, yang keseluruhannya dapat memengaruhi stabilitas sektor keuangan nasional (Nugraha, 2025). Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan responsif dan terkoordinasi, tekanan eksternal ini dapat merambat ke sektor domestik dan melemahkan fondasi ekonomi nasional, termasuk cadangan devisa, stabilitas sistem perbankan, dan ketahanan fiskal.

Sebagai upaya mitigasi, pelaku industri nasional mendorong pemerintah untuk mempercepat diversifikasi pasar ekspor. Langkah-langkah strategis seperti penguatan kerja sama dagang dengan negara non-tradisional, peningkatan nilai tambah produk

ekspor, serta percepatan implementasi perjanjian dagang seperti *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) menjadi krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. Pemerintah juga berupaya meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui pemberian insentif produksi, fasilitasi pembiayaan, dan reformasi regulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di pasar global (Surdikina et al., 2025). Dalam konteks menjaga ketahanan sektor keuangan nasional, kebijakan fiskal dan moneter perlu diarahkan secara terukur dan terkoordinasi untuk merespons tekanan eksternal tersebut. Penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter, pengelolaan utang yang *prudent*, serta dukungan terhadap sektor ekspor melalui pembiayaan produktif merupakan langkah kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.

Peran Mahasiswa dalam Mempersiapkan Sektor Keuangan Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi intelektual memiliki potensi strategis dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, kontribusi mahasiswa dapat diwujudkan melalui pemikiran kritis, inovatif, dan berbasis solusi. Keterlibatan aktif dalam forum ilmiah, kegiatan penelitian, dan diskusi publik menjadi sarana efektif dalam menghasilkan gagasan-gagasan segar yang dapat dijadikan referensi oleh para pengambil kebijakan dalam merespons perubahan ekonomi global. Selain itu, mahasiswa juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat, kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta partisipasi dalam kegiatan edukasi berbasis komunitas, mahasiswa berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sadar dan tangguh secara finansial. Peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pribadi yang bijak akan menciptakan individu yang melek finansial, rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta lebih siap dalam

menghadapi risiko keuangan, sehingga berdampak langsung terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. (Amaliah, 2025).

Dalam konteks transformasi digital dan perkembangan teknologi, mahasiswa dituntut untuk membekali diri dengan keterampilan digital dan semangat kewirausahaan. Penguasaan atas teknologi keuangan mutakhir seperti *financial technology* (fintech), *blockchain*, dan sistem pembayaran digital menjadi esensial dalam menghadapi disrupsi ekonomi. Mahasiswa yang adaptif terhadap perkembangan tersebut memiliki kesiapan lebih dalam menghadirkan solusi bagi sistem keuangan masa depan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Peran mahasiswa tidak hanya terbatas pada penguasaan teori ekonomi dalam ruang kelas, melainkan juga harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Inisiatif seperti proyek sosial, kampanye literasi, serta advokasi kebijakan publik menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya ketahanan sektor keuangan. Dalam hal ini, sinergi antara mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan tinggi menjadi krusial dalam mendorong pembelajaran ekonomi yang kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara nyata. (Amaliah, 2025).

Kesimpulan

Ketahanan sektor keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian global merupakan hasil dari sinergi berbagai kebijakan makroekonomi, pengawasan keuangan, serta komitmen kuat dari otoritas terkait seperti OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah. Meskipun tekanan global seperti kenaikan suku bunga acuan dunia, konflik geopolitik, dan proteksionisme perdagangan seperti tarif Amerika Serikat dan isu QRIS menimbulkan risiko eksternal yang signifikan, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas sistem keuangannya melalui strategi adaptif dan responsif. Kebijakan fiskal yang hati-hati, pengendalian inflasi, serta penguatan pengawasan sektor jasa keuangan terbukti mampu menjaga kepercayaan pasar dan keberlangsungan intermediasi keuangan. Peran generasi muda khususnya mahasiswa menjadi kunci penting dalam memperkuat ketahanan keuangan nasional ke depan. Melalui kontribusi

pemikiran kritis, literasi keuangan masyarakat, dan kesiapan terhadap transformasi digital, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Adenan, M., Lestari, I., & Yusran, H. (2025). Peran modal kontra-siklus dalam menjaga profitabilitas bank di era ketidakpastian global. *Jurnal Ekonomi dan Stabilitas Keuangan*, 3(1), 22–34.
- Amaliah, I. M. (2025, 28 Mei). *Ketahanan sektor keuangan di Indonesia di tengah ketidakpastian global*. Disampaikan dalam kegiatan Kajian Isu Ekonomi Mahasiswa Aktif (Kasumif), Universitas Islam Bandung.
- Aryowiloto, B., Nasution, D. K., & Lestari, S. N. (2024). QRIS lintas negara dan diplomasi keuangan Indonesia dalam integrasi sistem pembayaran regional ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Internasional*, 9(1), 112–125.
- Bank Indonesia. (2023). *Stabilitas sistem keuangan dan pengawasan makroprudensial*. <https://www.bi.go.id>
- Hanifa Salsabila, H., Aldina, S. A. F., & Disti, P. A. (2024). Analisis risiko keuangan pada perusahaan di era ketidakpastian ekonomi global: Fokus pada risiko likuiditas dan risiko kredit. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 570–582.
- Hidayat, S., Gapur, M. A., & Hendra, J. (2024). Tantangan dan peluang pasar modal syariah di era ketidakpastian ekonomi global. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2935–2940.
- International Monetary Fund. (2020). *Global financial stability report: Markets in the time of COVID-19*. <https://www.imf.org/en/Publications/GFSR>
- Kadariusman, I. (2025, 28 Mei). *Strategi OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah ketidakpastian global*. Disampaikan atas nama Kantor OJK Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Kajian Isu Ekonomi Mahasiswa Aktif (Kasumif), Universitas Islam Bandung.

- Kuswoyo, A., Pratama, H., & Mulyani, R. (2024). Pengaruh QRIS terhadap efisiensi transaksi UMKM di Indonesia. *Jurnal Inovasi Keuangan Digital*, 6(2), 45–60.
- Metri, L. A. (2024). QRIS dan kemandirian sistem pembayaran nasional: Studi strategi dan implikasi. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Keuangan*, 3(1), 98–110.
- Monica, S., Pratama, B. H., Putri, S. R., & Malik, A. (2025). Strategi mengelola utang di tengah ketidakpastian ekonomi global. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 3(1), 14–20.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan stabilitas sektor jasa keuangan*. <https://www.ojk.go.id>
- Rachman, Y., Dewi, F. K., & Ahmad, A. R. (2024). Tantangan implementasi QRIS: Infrastruktur dan literasi digital di daerah tertinggal. *Jurnal Transformasi Digital Indonesia*, 4(3), 77–90.
- Surdikina, N., Tompul, R. B., Sianipar, S. B., & Santika, S. (2025). Strategi pengelolaan utang negara: Menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 162–173.
- Widowati, C. (2024). Penyesuaian penyangga modal dan risiko bank-bank di Indonesia sebagai respons terhadap potensi krisis keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 66–85.